



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARDATIN
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 788579

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.010.000.000**

1. Tanah Seluas 298 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL
SENDIRI Rp. 70.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL
SENDIRI Rp. 80.000.000
5. Tanah Seluas 701 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000
6. Tanah Seluas 326 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/175 m2 di KAB / KOTA
SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 244 m2/244 m2 di KAB / KOTA KOTA
PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 483 m2/483 m2 di KAB / KOTA
SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 100.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 18.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	707.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.835.500.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.835.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.